

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 167 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PELAKSANA DAN *MONITORING* PERCEPATAN KEGIATAN PRIORITAS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua butir 17 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk dan menunjuk Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Kegiatan Prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, memiliki kompetensi dan berintegritas untuk melaksanakan dan memonitor kegiatan prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana dan

Monitoring Percepatan Kegiatan Prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA DAN *MONITORING* PERCEPATAN KEGIATAN PRIORITAS

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Kegiatan Prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Tim Pelaksana dan *Monitoring* dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan *Monitoring* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Kelompok Kerja Pelaksana; dan
 3. Kelompok Kerja *Monitoring*.
- KETIGA : Tim Pelaksana dan *Monitoring* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas:
1. Pengarah:
memberikan pengarahan, melakukan pengawasan, dan pengendalian atas tugas Tim Kerja.
 2. Kelompok Kerja Pelaksana:
 - a. melaksanakan kegiatan prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi:
 - 1) Katalog Elektronik Nasional;
 - 2) Katalog Elektronik Sektoral;
 - 3) Toko Daring;
 - 4) harmonisasi dan korespondensi kodifikasi;
 - 5) konsolidasi belanja;
 - 6) perbaikan sistem katalog dan integrasi sistem;
 - 7) pengembangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
 - 8) penanganan pengaduan (*Complaint Handling*); dan
 - 9) peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- b. membuat laporan progres kegiatan prioritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkala.
3. Kelompok Kerja *Monitoring*:
mengumpulkan, mengelola, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang dibutuhkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Pelaksana dan *Monitoring* dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim Pelaksana dan *Monitoring*.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Sektorial pada Kementerian/Lembaga;
2. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Elektronik Komoditas *Internet Service Provider* (ISP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 31 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Elektronik Komoditas *Internet Service Provider (ISP)*;
3. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Elektronik Komoditas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Elektronik Komoditas Kendaraan Bermotor;
 4. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Elektronik Komoditas Alat Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Elektronik Komoditas Alat Olahraga;
 5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Elektronik Etalase Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 34 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Elektronik Etalase Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya;
6. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Elektronik Etalase Produk Sewa Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 69 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Elektronik Etalase Produk Sewa Kendaraan;
 7. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tim *Monitoring* Percepatan Katalog Elektronik Nasional dan Katalog Elektronik Lokal;
 8. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 30 Tahun 2022 tentang Verifikator dan Sekretariat Verifikator Katalog Elektronik Etalase Produk Perkakas, Etalase Produk Alat Penerangan Jalan, Etalase Produk Peralatan Pendidikan, Etalase Alat Laboratorium, Etalase Produk Material/Bahan Bangunan, dan Etalase Produk Peralatan Perkantoran; dan
 9. Surat Tugas Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9936/SES/04/2022 tanggal 26 April 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Seluruh pelaksanaan tugas oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, dilakukan serah terima kepada Tim Pelaksana dan *Monitoring* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

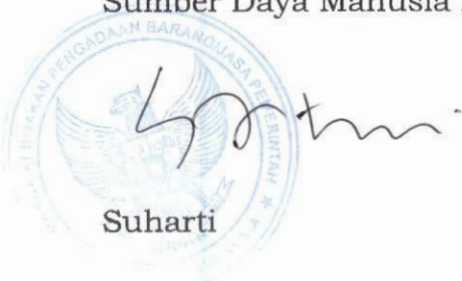
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA DAN *MONITORING*
PERCEPATAN KEGIATAN
PRIORITAS LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 167 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JUNI 2022

**TIM PELAKSANA DAN *MONITORING* PERCEPATAN KEGIATAN PRIORITAS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	1. Robin Asad Suryo	Rp750.000,00
		2. Sarah Sadiqa	Rp750.000,00
		3. Gatot Pambudhi Poetranto	Rp750.000,00
		4. Sutan Suangkupon Lubis	Rp750.000,00
		5. Setya Budi Arijanta	Rp750.000,00
2.	Kelompok Kerja Pelaksana		
	a. Kelompok Kerja Katalog Elektronik Nasional		
	Penanggung Jawab	Yulianto Prihhandoyo	-
	Anggota	1. Edi Kristianto	Rp500.000,00
		2. Hilman Fazri	-
		3. Bambang Saputra	Rp500.000,00
		4. Joko Heratmo	Rp500.000,00
		5. Ali Masrochan	Rp500.000,00
		6. Juniarty Erika Magdalena Saragi	Rp500.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		7. Anindita Widya Sismiati	Rp500.000,00
		8. Moses Alfredo Samodara	-
	b. Kelompok Kerja Katalog Elektronik Sektoral		
	Penanggung Jawab	M. Aris Supriyanto	-
	Anggota	1. Selamat Budiharto	-
		2. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Rp500.000,00
		3. Erlangga Aninditya	-
		4. Nuraini Darmastuti	Rp500.000,00
		5. Muhamad Dwi Sumanto	Rp500.000,00
		6. Sari Melani	Rp500.000,00
		7. Seno Haryo Wibowo	Rp500.000,00
		8. Febrita Sidabalok	-
		9. Desi Kartika	Rp500.000,00
		10. Eben Henry Reagen Mangihut Simanjuntak	Rp500.000,00
		11. Yasmine Permata Sari	Rp500.000,00
		12. Kartika Fitriyani	Rp500.000,00
		13. Nida Mufidah Anggraini	Rp500.000,00
		14. L. Rani Esi Hapsari	-
		15. Aisyah Khoirun Nisa	Rp500.000,00
	c. Kelompok Kerja Toko Daring		
	Penanggung Jawab	Hardi Afriansyah	Rp700.000,00
	Anggota	1. Yudi Prasetiawan	Rp500.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		2. Tri Susanto	Rp500.000,00
		3. Anatasia	Rp500.000,00
		4. Andri Priyo Utomo	-
		5. Ilvia Restu Utami	Rp500.000,00
		6. Mira Erviana	Rp500.000,00
		7. Nuraini Darmastuti	-
		8. Imam Arumsyah	-
		9. Fenita Enggraini	Rp500.000,00
		10. Dian Arsita Wardhani	Rp500.000,00
		11. Octaviana Anggraeni	Rp500.000,00
		12. Anas Bayu Kusuma	Rp500.000,00
		13. Budi Bowo Laksono	Rp500.000,00
		14. Galuh Arini Sasi Kirono	Rp500.000,00
		15. Andi Darmawan	Rp500.000,00
		16. Wahyu Eko Saputro	Rp500.000,00
		17. Mirayanti	Rp500.000,00
		18. Eko Nirwanto Putro Hanardi	Rp500.000,00
		19. Diani Bahri Puteri	Rp500.000,00
		20. Dandy Darmawan	-
		21. Alex Putra Setiadi	-
		22. Syarah Isnaini Harahap (Kementerian Dalam Negeri)	Rp500.000,00
		23. Guruh Rizaldi (Kementerian Dalam Negeri)	Rp500.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
	d. Kelompok Kerja Harmonisasi dan Korespondensi Kodifikasi		
	Penanggung Jawab	1. Emin Adhy Muhaemin	Rp700.000,00
		2. Gusmelinda Rahmi	Rp700.000,00
	Anggota	1. Fajar Adi Hemawan	Rp500.000,00
		2. Antonius Lambok Sihombing	Rp500.000,00
		3. Ilvia Restu Utami	-
		4. Andri Priyo Utomo	Rp500.000,00
		5. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	Rp500.000,00
		6. Biantri Raynasari	Rp500.000,00
		7. Ermawanto	Rp500.000,00
		8. Cecep Hendar Supriadi	Rp500.000,00
		9. Fenita Enggraini	-
		10. Prima Salti	Rp500.000,00
		11. Rizky Dwi Raharjo	Rp500.000,00
		12. Andi Darmawan	-
		13. Muhamad Taufikurrohman	Rp500.000,00
		14. Winny Adlina Pratomo	Rp500.000,00
		15. Dandy Darmawan	-
	16. Lien Suharni (Badan Pusat Statistik)	Rp500.000,00	
	17. Yenny Rimawati (Badan Pusat Statistik)	Rp500.000,00	

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
	e. Kelompok Kerja Konsolidasi Belanja		
	Penanggung Jawab	M. Aris Supriyanto	Rp700.000,00
	Anggota	1. Selamat Budiharto	Rp500.000,00
		2. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	-
		3. Arif Rachman	Rp500.000,00
		4. Erlangga Aninditya	Rp500.000,00
		5. Fajar Adi Hemawan	-
		6. Imam Arumsyah	Rp500.000,00
		7. Arif Budiman	Rp500.000,00
		8. Muhamad Dwi Sumanto	-
		9. Vina Da'watul Aropah	Rp500.000,00
		10. Ketsia Aprilianny Laya	Rp500.000,00
		11. Seno Haryo Wibowo	-
		12. M. Qadr Siddiq Zam	Rp500.000,00
		13. Eben Henry Reagen Mangihut Simanjuntak	-
		14. Agung Ismail	Rp500.000,00
		15. Paramitha Agdina Pusparini	Rp500.000,00
		16. Aisyah Khoirun Nisa	-
		17. I Nyoman Aditya Wicaksana	Rp500.000,00
		18. Novida Widarani	Rp500.000,00
		19. Nida Mufidah Anggraini	-

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
	f. Kelompok Kerja Perbaikan Sistem Katalog dan Integrasi Sistem		
	Penanggung Jawab	1. Patria Susantosa	-
		2. Fadli Arif	Rp700.000,00
	Anggota	1. Ari Sulindra	-
		2. Selamat Budiharto	-
		3. Fajar Adi Hemawan	-
		4. Ade Rizky Emirsyah	Rp500.000,00
		5. Yudi Prasetiawan	-
		6. Andy Martanto	Rp500.000,00
		7. Widya Prima Sari Fultanegara	Rp500.000,00
		8. Tito Sulistyو	Rp500.000,00
		9. Himawan Giri Dahlan	Rp500.000,00
		10. Sugianto	-
		11. Mahsa Elvina Rahmawyanet	-
		12. Mira Erviana	-
		13. Andri Priyo Utomo	-
		14. Aloysius Sigit Wicaksono	-
		15. Rizky Dwi Raharjo	-
		16. Audita Octaviani	Rp500.000,00
		17. Yudhianto Dwi Andika Putra	-
		18. Winny Adlina Pratomo	-
	19. Muhammad Fakhri Naufaldi	-	
	20. Andi Darmawan	-	

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		21. Anas Bayu Kusuma	-
		22. Muhamad Taufikurrohman	-
		23. Alina Mahardhika Puspa	Rp500.000,00
		24. Iswan Huntoyungo	Rp500.000,00
		25. Zuli Taufik (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal)	Rp500.000,00
g. Kelompok Kerja Pengembangan SiRUP			
	Penanggung Jawab	Fadli Arif	-
	Anggota	1. Heldi Yudiyatna	-
		2. Setio Widodo	Rp500.000,00
		3. Andy Martanto	-
		4. Himawan Giri Dahlan	-
		5. Angga Sanjaya Lingga	Rp500.000,00
		6. Tino Yuka Aldila	Rp500.000,00
		7. Frans Yoenero	-
		8. Hendarwan Suryandaru	Rp500.000,00
		9. Winny Adlina Pratomo	-
		10. Yoga Nurdani	Rp500.000,00
		11. Ayu Rosalina Wibowo	-
		12. Muchlis Satriyo Ginanjar	-
		13. Tiara Latifa Permanasari	-
h. Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (<i>Complaint Handling</i>)			
	Penanggung Jawab	1. Jhon Piter Situmorang	Rp700.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
	Wakil Penanggung Jawab/Anggota	2. Yulianto Prihhandoyo	Rp500.000,00
	Anggota	1. Ari Sulindra	Rp500.000,00
		2. Devi Yanurida	Rp500.000,00
		3. Resa Anggriani	Rp500.000,00
		4. Mira Erviana	-
		5. Hilman Fazri	Rp500.000,00
		6. Rini Handriyani	Rp500.000,00
		7. Mukti Herlambang	Rp500.000,00
		8. Febri Kamalisa Rachman	Rp500.000,00
		9. Makkiyah Farizqi	Rp500.000,00
		10. Muhammad Fakhri Naufaldi	Rp500.000,00
		11. Sri Utaminingsih	Rp500.000,00
		12. Ahmad Khairunnas	Rp500.000,00
		13. Carolina Maria Anggreini	Rp500.000,00
		14. Yogie Prastiyans	Rp500.000,00
		15. Jefry Seftian	Rp500.000,00
		16. Ali Masrochan	-
		17. Eva Sinaga	Rp500.000,00
	i. Kelompok Kerja Peningkatan Nilai SAKIP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
	Penanggung Jawab	Gusmelinda Rahmi	-
		1. Setio Widodo	-
		2. Satriyo Wibowo	Rp500.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium		
		3. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	-		
		4. Biantri Raynasari	-		
		5. Resa Anggriani	-		
		6. Erwin Sondang Siagian	-		
		7. Cecep Hendar Supriadi	-		
		8. Mario Duwi Cahyo	Rp500.000,00		
		9. Maulida Najwa	Rp500.000,00		
		10. Yulia Dela Dacrea	Rp500.000,00		
		11. Novan Kharisma Salainti (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	Rp500.000,00		
		3	Kelompok Kerja <i>Monitoring</i>		
			Penanggung Jawab	Shahandra Hanitiyo	Rp700.000,00
	Wakil Penanggung Jawab/Anggota	1. Gusmelinda Rahmi	-		
		2. Suharti	Rp500.000,00		
		3. Hermawan	Rp500.000,00		
	Anggota	1. Mustika Rosalina	-		
		2. Dodi Wahyugi	Rp500.000,00		
		3. Edi Kristianto	-		
		4. Miftah Irfaniah	Rp500.000,00		
		5. Rinaldi Morintosh	Rp500.000,00		
		6. Nicke Kusuma Devi	Rp500.000,00		

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		7. Angga Widita Amirul	Rp500.000,00
		8. Ermawanto	-
		9. Mieke Eka Putri	Rp500.000,00
		10. Siti Ulyanah	Rp500.000,00
		11. Estu Retno Yulianti	Rp500.000,00
		12. Ikbal Amaludin	-
		13. Manshur Riadli	Rp500.000,00
		14. Benny Leopold Dumais	Rp500.000,00
		15. Imelda Liliana	Rp500.000,00
		16. Jidda Hadiyana	Rp500.000,00
		17. Moses Alfredo Samodara	Rp500.000,00
		18. Ayu Rosalina Wibowo	-
		19. Made Widhiantika	-

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS